

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

China telah muncul sebagai kekuatan besar dunia. Tidak lagi sebagai sebuah negara tertutup, terbelakang, dengan produksi barang-barang imitasi berkualitas rendah dan berbasiskan sistem komunis. China telah mentransformasikan dirinya secara sosial, budaya, politik, hingga ekonomi.<sup>1</sup> Saat ini, China menjadi lebih maju, modern, terbuka, kuat secara ekonomi dengan menjadi pusat manufaktur perusahaan-perusahaan besar dunia, hingga mengalami surplus perdagangan yang besar dengan Amerika Serikat. Dalam pertahanan pun China memiliki angkatan senjata yang tangguh. Sekarang, China telah menjelma menjadi negara yang disegani dan daya tawar yang tinggi di dunia internasional.<sup>2</sup>

China memelihara hubungan yang bersahabat dan stabil di Asia Tenggara merupakan faktor utama dalam upaya memwujudkan pencapaian tujuan-tujuan China yaitu menjadi negara yang mempunyai kekuatan regional dan global. Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki kekayaan sumber daya alam, Asia Tenggara akan selalu menjadi penggerak penting dari modernisasi ekonomi China. China memelihara hubungan baik dengan Asia Tenggara dalam rangka

---

<sup>1</sup> Koesmawan, "Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia Ke China :Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-China", Jurnal Ekonomi & bisnis No.2 Jilid 7, Tahun 2002.

<sup>2</sup> Nanda Akbar A," Transformasi besar China", Diakses <http://politik.kompasiana.com/2011/06/26/transformasi-besar-china/>, pada tanggal 07 Juni 2011,pukul 9.14 wib

membantu China dalam membangun ekonominya.<sup>3</sup> Kebijakan regional China terhadap stabilitas Asia Tenggara sangat penting karena mayoritas perdagangan China, seperti impor minyak bumi melalui perairan Asia Tenggara, dimana China berharap dengan meningkatnya interaksi ekonomi khususnya dalam bidang perdagangan dengan kawasan Asia Tenggara dapat membantu pertumbuhan China.

Dalam hal ini China lebih mengembangkan ekonominya dibandingkan politik dan keamanan. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari dimensi politik, sentralisasi politik China tidak bisa bertahan dalam sistem ekonomi yang makin terbuka baik secara domestik dan dalam hubungannya dengan ekonomi internasional. Sistem politik China dituntut untuk memberikan perhatian lebih kepada aspek kesejahteraan sosial dan kebijakan-kebijakan politik kepada mereka yang terkena efek negatif dari pertumbuhan ekonomi China, misalnya dalam hal kesempatan kerja, pendidikan, dan pelayanan kesehatan terutama kepada para petani dan masyarakat pedesaan. Hal ini merupakan tantangan politik bagi China yang ideologinya yaitu komunis. Secara eksternal, kepentingan ekonomi China juga memaksa China untuk menerapkan politik luar negeri yang bersahabat dengan masyarakat internasional dengan diikuti oleh diplomasi yang makin aktif untuk melindungi kepentingan strategis dan perdagangan internasionalnya. Sedangkan dilihat dari dimensi keamanan China tidak menggunakan secara militer untuk mendekati kawasan Asia Tenggara tetapi China lebih menggunakan

---

<sup>3</sup> Hilman Halim, "Potensi Strategis Hubungan China-ASEAN, Indonesian Voices, tanggal 04 Maret 2010, diakses dari [http://indonesianvoices.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=159:potensi-hubungan-china-asean&catid=43:isu-asean&Itemid=62](http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159:potensi-hubungan-china-asean&catid=43:isu-asean&Itemid=62) pada tanggal 02 Oktober 2011, pukul 09.55 wib

*soft power* untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat. Menurut Joseph S. Nye, Soft Power adalah kemampuan suatu negara untuk membujuk negara lain dengan menggunakan pengaruh dalam melakukan sesuatu. Ideologi, budaya, prestise atau kesuksesan suatu negara merupakan daya tarik bagi negara lain sehingga negara itu bisa menjadi pemimpin, dan negara-negara lain dengan sukarela bertindak sebagai pengikut.

Kawasan Asia Tenggara merupakan posisi penting bagi China baik secara politik maupun strategis. Hal ini tidak akan semakin kuat untuk bekerjasama karena kepentingan China yang makin besar untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini di sebabkan karena pertama, Asia Tenggara adalah kunci untuk memperluas pengaruh terutama persaingan dengan Jepang dan Amerika Serikat. Kedua, Asia Tenggara sangat strategis untuk kepentingan ekonomi dan keamanan, terutama karena menjadi jalur laut internasional SLOC (*Sea Lanes Of Communication*), perairan Asia Tenggara di layari oleh kapal-kapal dagang dan tenker dengan nilai lebih dari 350 milyar dollar tiap tahun. Sembilan puluh persen minyak China juga melalui perairan Asia Tenggara. Ketiga, Asia Tenggara yang berpenduduk sekitar 500 juta jiwa merupakan pasar yang sangat potensial bagi China, bahkan menjadi area investasi di masa yang akan datang. Keempat, Asia Tenggara menjadi area sangat penting bagi China untuk mengembangkan strategi untuk menyeimbangkan posisi dengan Amerika Serikat di kawasan. Kelima, Asia Tenggara penting bagi Cina untuk bersama-sama menghadapi tekanan Barat dan hak asasi manusia. Memang tidak dapat dipungkiri, krisis ekonomi tahun 1997 memberikan ruang yang cukup

luas bagi China untuk lebih aktif di Asia Tenggara, dimana China bersedia untuk tidak mendevaluasi mata uangnya yaitu Yuan walaupun China jelas mengalami tekanan berat.<sup>4</sup>

Dalam hal ini China mempunyai kepentingan untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan China ingin sepenuhnya menguasai ekonomi yang ada di wilayah Asia Tenggara dan bahan bakunya, untuk kebutuhan industrinya. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh Amerika Serikat (AS) di wilayah Asia Tenggara yang sangat signifikan. Sebagai negara adidaya, pengaruh AS sangat signifikan bagi dunia. Pengaruh AS yang paling terasa bagi dunia adalah pada saat masalah krisis ekonomi muncul. Krisis ekonomi yang berawal dari krisis finansial dengan terjadinya kasus *subprime mortgage* telah mendorong perekonomian AS ke dalam jurang resesi. Di Asia Tenggara dampak krisis ekonomi sudah terasa, dengan menurunnya jumlah permintaan ekspor ke negeri Paman Sam tersebut. Sebagai negara Adidaya, kebijakan domestik atau luar negeri AS tentu akan banyak mempengaruhi negara-negara lain, termasuk negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Asia Tenggara merupakan wilayah pangsa pasar ekspor Amerika Serikat. Dengan ini China meluncurkan strateginya untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara melalui strategi perdagangan, karena dengan strategi perdagangan tersebut negara-negara Asia Tenggara akan ketergantungan dengan China.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Igor Dirgantara, "Analisis Cina di Asia Tenggara", 09 Februari 2010, Diakses dari <http://oseafas.wordpress.com/2010/02/09/analisis-cina-di-asia-tenggara/> pada tanggal 07 November 2011

<sup>5</sup> Dewi Triwahyuni, "Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat", Majalah UNIKOM Vol.9 No.1

Seiring dengan berjalannya waktu, China semakin mempererat hubungan dengan Asia Tenggara baik hubungan bilateral dan multilateral dalam bidang perdagangan. Dalam hal ini dapat dilihat China tergabung dalam organisasi *Asean Regional Forum (ARF)*<sup>6</sup>, *ASEAN Plus Three (China, Jepang, Korea)*<sup>7</sup>, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*<sup>8</sup>, dan untuk menyaingi perdagangan Amerika Serikat, China berkerja sama dengan ASEAN yaitu pada tanggal 4 November 2004 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China (ACFTA)* telah ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja oleh

---

<sup>6</sup> ARF (ASEAN Regional Forum) adalah ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF. ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE). ARF menyepakati bawa konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan Amerika Serikat. Anggota ARF berjumlah 25 negara yang terdiri atas seluruh negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina), 10 negara Mitra Wicara ASEAN (Amerika Serikat, Kanada, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) serta negara di kawasan seperti Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan dan Timor-Leste.

<sup>7</sup> *ASEAN Plus Three (APT)* terjalin sejak tahun 1997 pada saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi, dimana KTT APT pertama berlangsung di Kuala Lumpur pada Desember 1997. Dalam periode 10 (sepuluh) tahun pertama 1997-2007, pelaksanaan kerjasama APT didasarkan pada *Joint Statement on East Asia Cooperation, East Asia Vision Group Report* dan *Report of the East Asia Study Group*. China, Jepang dan Republik Korea telah mengaksesi *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* masing-masing pada tahun 2003 (China) dan tahun 2004 (Jepang dan Korea Selatan). Bidang-bidang kerjasama APT berdasarkan *Joint Statement on East Asia Cooperation (1999)* antara lain mencakup perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, transfer teknologi, teknologi telematika, *e-commerce*, industri, pertanian, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pengembangan *growth areas*, jejaring dunia usaha, dan iptek. Di bidang ekonomi dan moneter, kerjasama antara lain mencakup manajemen risiko makro ekonomi, *monitoring regional capital flow*, memperkuat sistem keuangan dan perbankan, serta reformasi arsitektur keuangan internasional.

<sup>8</sup> APEC adalah suatu forum kerjasama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Forum tersebut berdiri tahun 1989 dan beranggotakan 21 ekonomi - Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philipina, Russia, Singapore, China Taipei, Thailand, dan Amerika Serikat. APEC merupakan forum kerjasama yang penting dan strategis dalam perekonomian dunia mengingat dengan jumlah penduduk 2,5 miliar, secara keseluruhan anggotanya mempunyai produk domestik bruto sebesar 19 triliun US dollar dan mencakup 45 persen perdagangan dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir, forum kerjasama ekonomi tersebut telah membuktikan diri sebagai kawasan ekonomi yang dinamis dan menyumbangkan 70 persen dari pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan keragaman sistem politik, tingkat pembangunan/kemakmuran dan nilai sosial-budaya, maka APEC perlu mengembangkan suatu proses yang cocok untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan dalam hal ini akan mendorong APEC memainkan peran yang semakin penting, bahkan menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kesejahteraan dan stabilitas dunia di masa mendatang.

para Kepala Negara ASEAN dan RRC. Perjanjian ini dibuat karena memiliki tujuan yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama dalam perdagangan antara kedua pihak, meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif, mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan untuk kedua pihak, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak.<sup>9</sup> Peningkatan hubungan China – Asia Tenggara semakin di pererat dengan adanya kesepakatan FTA antara ASEAN – China pada tanggal 29 November 2004. Kesepakatan ini berisi ketentuan-ketentuan dalam hal membuka pasar yang seluas-luasnya bagi produk -produk yang berasal dari China di kawasan Asia Tenggara dengan menghilangkan hambatan tarif dalam pembebasan bea masuk. Pelaksanaan FTA ini dimulai sejak tahun 2010 untuk 6 negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, sedangkan 4 negara lainnya yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam akan dijalankan 2015.<sup>10</sup>

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yang perlu penulis kaji lebih lanjut yaitu:

---

<sup>9</sup> Djauhari Oratmangun, “Kerjasama ASEAN-China dan Stabilitas Kawasan Asia Timur”, Tabloid Diplomasi, tanggal 20 Agustus 2009, Diakses pada <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36-juni-2009/106-kerjasama-asean-china-dan-stabilitas-kawasan-asia-timur.html>, pada tanggal 02 Oktober 2011, pukul 10.12 wib

<sup>10</sup> Vincent Wang, “China-ASEAN Free Trade Area: A Chinese “Monroe Doctrine” or “Peaceful Rise”?”, China Brief Volume: 9 Issue: 17, pada tanggal 20 Agustus 2009, Diakses dari [http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=35434&cHash=d1d96f3f64](http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35434&cHash=d1d96f3f64) pada tanggal 02 Oktober 2011, pukul 08.00.

Mengapa China memilih strategi perdagangan sebagai instrumen untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitaian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepentingan China di wilayah Asia Tenggara
2. Untuk mengetahui pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara dan efeknya bagi China
3. Untuk mengetahui pilihan-pilihan strategi yang pernah diapdosi China sebelumnya
4. Untuk mengetahui strategi perdagangan seperti apa yang dijalankan oleh China

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan penjelasan secara umum dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai China mempergunakan strategi perdagangan untuk menguasai wilayah Asia Tenggara.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi siapa

saja yang akan melakukan riset tentang hubungan kerjasama Asia Tenggara dengan China.

### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Begitu banyak literatur yang mengkaji dan membahas tentang perdagangan China dan Asia Tenggara, adapun beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain:

Dalam jurnal yang berjudul “*China’s Strategy for Free Trade Agreements: Political Battle in the Name of Trade*”, Henry Gao mengemukakan bahwa awalnya China tidak mau untuk terlibat dalam perundingan *Free Trade Agreement* (FTA), padahal China telah berangsur-angsur menjadi pemain aktif dalam persaingan global FTA. Sementara FTA China masih tertinggal dibanding pemain utama lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, dimana yang sedang berkembang pesat. Sebagai salah satu negara perdagangan paling penting di dunia, keputusan China untuk mengejar jalan aktif negosiasi FTA memiliki implikasi bagi semua negara di dunia. Sebelum mereka bisa memutuskan bagaimana menanggapi FTA China, mereka harus terlebih dahulu memahami strategi FTA China. Henry Gao, berpendapat pertimbangan ekonomi mungkin merupakan faktor penting dalam keputusan China untuk mengejar FTA, motivasi utama sejauh ini tampaknya adalah pertimbangan politik. Pada intinya, China telah berusaha menggunakan jaringan FTA untuk mengembangkan dan mencari sekutu strategis sebagai bagian dari strategi untuk membangun lingkungan internasional yang kondusif untuk menciptakan



"*peaceful rise*".<sup>11</sup> Ini merupakan tantangan dan kesempatan bagi negara yang berbeda. Sementara beberapa negara dipilih sebagai mitra FTA karena kepentingan strategis mereka, negara-negara lain mungkin akan ditinggalkan karena kurangnya nilai strategis. Dalam jurnal Henry Gao, hanya menjelaskan tujuan China untuk mengejar FTA, didalam artikel disini tidak menjelaskan, China menggunakan strategi FTA untuk membendung pengaruh Amerika Serikat. Jurnal ini hanya menjelaskan bagaimana China telah berusaha menggunakan jaringan FTA untuk mengembangkan dan mencari sekutu strategis sebagai bagian dari strategi untuk membangun lingkungan internasional yang kondusif untuk menciptakan "*peaceful rise*".

Dalam jurnal yaang berjudul "*Is China an Economic Threat to Southeast Asia?*", John Ravenhill mengemukakan bahwa pengamatan terhadap data-data perdagangan antara China dan ASEAN dan arah perdagangan internasional dari China maupun negara-negara ASEAN memperlihatkan bahwa potensi kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua pihak sangatlah besar. Jika sebelumnya China dan negara-negara ASEAN bersaing di pasar negara maju terutama Amerika Serikat dan Jepang, dengan semakin menguatnya market share China di kedua negara tersebut yang semakin menggantikan market share China dan menggantikan market share ASEAN, China akan menjadi pusat industri baru yang merupakan *supplier* utama pasar kedua negara tersebut. Sekalipun negara-negara ASEAN mungkin agak rugi, kerugian ini akan tertutupi dengan terbukanya pasar baru yang lebih besar di China sendiri karena China akan semakin membutuhkan

---

<sup>11</sup> Henry Gao, "China's Strategy for Free Trade Agreements: Political Battle in the Name of Trade", 2009, diakses dari [http://www.networkideas.org/ideasact/dec09/pdf/Henry\\_Gao.pdf](http://www.networkideas.org/ideasact/dec09/pdf/Henry_Gao.pdf) pada tanggal 25 Oktober 2011, pukul 07.00

barang modal berupa komponen industri bagi perusahaan-perusahaan manufakturnya. Dengan demikian, arah perdagangan akan beralih dan dengan *ASEAN-China Free Trade Agreement*, proses peralihan arah perdagangan ini semakin cepat dan bisa diharapkan menciptakan “*regional division of labour*” di wilayah Asia.<sup>12</sup>Dengan ini akan menimbulkan sebuah ancaman bagi ASEAN dimana pertumbuhan ekonomi China berkembang dengan cepat. Barang produksi ASEAN akan bersaing dengan barang produksi China, dimana barang produksi China akan menguasai pasar produksi ASEAN. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN akan mengalami pertumbuhan yang sangat lemah. Bagi China dengan adanya ini, China merasa beruntung sekali karena mendapatkan surplus dari *ASEAN-China Free Trade Agreement*.

Dalam artikel yang berjudul “*China-ASEAN Free Trade Area: A Chinese "Monroe Doctrine" or "Peaceful Rise"?*”, Vincent Wang beranggapan pasca tahun 1990an China mulai bangkit dalam mengembangkan ekonominya. China mulai menjalin baik hubungannya dengan Asia Tenggara, dimana China mulai membentuk *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* yaitu dilaksanakan pada tahun 2010 untuk ASEAN 6 ( Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand ), dan pada tahun 2015 untuk 4 negara ASEAN ( Kamboja, Laos, Myamar, dan Vietnam ). Dengan kemunculan China ini untuk mencapai perdagangan bebas itu menandakan bahwa China mempunyai kebijakan baru. Menurut Vincent hal tersebut masih mempertanyakan apakah diplomasi aktif dari ekonomi Cina di Asia Timur akan memacu persaingan

---

<sup>12</sup> John Ravenhill, "Is China an Economic Threat to ASEAN", *Asian Survey*, Vol. XLVI, No.5, September/October 2006, hlm.664

komersial di wilayah di mana konflik kekuatan masih mungkin terjadi. Tetapi China yakin akan kebijakan yang telah di buat China, China merasakan dengan kebijakan “*peaceful rise*” akan mengembangkan perekonomiannya dan dapat menguasai Asia Tenggara.<sup>13</sup>

Dalam artikel yang berjudul “*China-ASEAN: From Interdependence to Political Influence?*”, Afrimadona beranggapan dimana kekuatan ekonomi China dapat digunakan untuk memajukan kepentingan politik di Asia Tenggara. Tetapi hal tersebut diperdebatkan oleh para ahli. Hal ini dikarenakan banyak para ahli yang meragukan kemampuan China untuk mendominasi Asia, dikarenakan kekuatan ekonomi China masih terbatas dan jauh dibawah Amerika Serikat dan sekutu seperti Jepang dan Uni Eropa. Padahal secara teoritis, pengaruh politik bisa efektif dalam hubungan yang saling bergantung. Afrimadona, mengemukakan China memanfaatkan *Interdependence* (kesalingtergantungan) ini untuk mencapai kepentingan politik di Asia Tenggara. Saling ketergantungan ekonomi antara China dan ASEAN dapat diaktifkan untuk menjalankan kekuasaannya dengan negara tetangga ASEAN. Seperti kerjasama China-ASEAN dalam *Free Trade Agreement*. Tetapi, kemampuan China untuk mempengaruhi negara-negara ASEAN sangat terbatas. Dalam hal ini kondisi untuk pengaruh kekuasaan yang efektif berdasarkan saling ketergantungan, ketersediaan sistem politik yang ditawarkan China yaitu sumber daya dan utilitas marjinal yang tinggi dari negara-negara ASEAN untuk sumber daya ekonomi. Tetapi, jika kita melihat hati-hati,

---

<sup>13</sup> Vincent Wang, “*China-ASEAN Free Trade Area: A Chinese "Monroe Doctrine" or "Peaceful Rise"?*”, China Brief Volume: 9 Issue: 17, pada tanggal 20 Agustus 2009, Diakses dari [http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=35434&cHash=d1d96f3f64](http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35434&cHash=d1d96f3f64) pada tanggal 02 Oktober 2011, pukul 08.00.

tren jangka panjang FTA dapat meniadakan konsekuensi dari hambatan saling ketergantungan. Dengan FTA secara bertahap akan mengintensifkan hubungan ekonomi melalui jaringan produksi dan spesialisasi produksi di kawasan sehingga masih ada potensi kekuatan hubungan antara China dan ASEAN.<sup>14</sup>

Dalam artikel yang berjudul “*Strategic Dimensions of Economic Interdependence in Southeast Asia*”, Donald E. Weatherbee mengemukakan motif utama analisis kontemporer hubungan internasional dan ekonomi politik Asia Timur dan Tenggara yaitu membahas "kebangkitan China." Beberapa pengamat melihat peran ekonomi China meningkat, dimana China sebagai mitra dagang utama negara-negara ASEAN telah memainkan peran kunci untuk membantu mengurangi dominasi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Donald E. Weatherbee melihat posisi regional Cina muncul sebagai dasar untuk menantang kebijakan strategis AS di kawasan tersebut sejak 1950. Peran keamanan Amerika Serikat di Asia Tenggara sangat penting bagi perdamaian, stabilitas dan menjaga keseimbangan daerah kekuasaan dengan Amerika Serikat, kekuatan ekstra-regional dominan besar. Kepentingan keamanan regional negara-negara Asia Tenggara bertujuan untuk menghindari, membantu untuk mempromosikan lingkungan strategis yang non-mengancam baik Cina atau Amerika Serikat. Bagi negara-negara ASEAN, hubungan bilateral mereka dengan kekuatan ekstra-regional semakin dikaitkan dengan hubungan kelompok mereka dalam format ASEAN+1 atau kerangka kerja multilateral lainnya seperti keamanan berorientasi Forum Regional ASEAN (ARF). ASEAN sebagai *platform* kebijakan regional,

---

<sup>14</sup> Afrimadona, ““*China-ASEAN: From Interdependence to Political Influence?*”,05 Januari 2011, Lanskap Baru Politik Internasional:Proceeding Konvensi Nasional I AJHII, hal.94

menjadi lebih penting untuk anggota ketika mereka mulai bergerak menuju format yang lebih terintegrasi organisasi-organisasi regional. Cina dan Amerika Serikat mengakui pentingnya ASEAN dan anggotanya telah menempatkan hubungan bilateral mereka di Asia Tenggara dalam konteks perkembangan regionalisme ASEAN. Dalam konteks ini, negara-negara ASEAN berharap bahwa saling ketergantungan pertumbuhan regional yang melibatkan Cina dan Amerika Serikat adalah sebagai mediator hubungan dengan kepentingan bersama dalam menjaga lingkungan strategis yang stabil. Interdependensi ekonomi diekspresikan melalui proliferasi perdagangan bebas bilateral dan multilateral. Cina cenderung membayangi fakta bahwa hubungan ekonomi ASEAN untuk Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa (UE) jauh lebih banyak dibandingkan dengan China.<sup>15</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Perubahan Strategi Perdagangan China Di Wilayah Asia Tenggara Dari Bilateralisme Ke Multilateralisme”, Roro Lonita Lorensa membahas tentang perubahan paradigma kebijakan perdagangan internasional China di wilayah Asia Tenggara dari bilateralisme menjadi multilateralisme yang tertuang lewat kerjasama *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Lonita menjelaskan bahwa perubahan paradigma kebijakan perdagangan internasional China dengan wilayah Asia Tenggara terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan perubahan persepsi dan paradigma pembangunan para pemimpin China dan perubahan konstelasi politik dalam negeri. Sementara faktor eksternal terkait dengan keinginan China dalam membendung kekuatan Amerika Serikat

---

<sup>15</sup> Donald E. Weatherbee, ““Strategic Dimensions of Economic Interdependence in Southeast Asia”, *Strategic Asia 2006-2007*, The National Bureau of Asian Research, hal 271

dan Jepang serta perubahan dinamika politik di ASEAN.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian saya. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas pilihan-pilihan strategi China dalam upaya mencapai kepentingan yakni membendung kekuatan Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara. Secara spesifik, mengapa China lebih memilih strategi perdagangan dari pada strategi lainnya seperti strategi militer, diplomasi publik , dan sebagainya.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Teori Perdagangan Internasional**

Dengan liberalisasi perdagangan baik yang bersifat internasional maupun regional, hambatan-hambatan perdagangan dapat kurangi dan bahkan dihilangkan. Integrasi ekonomi regional adalah suatu proses dimana beberapa ekonomi dalam suatu wilayah bersepakat untuk menghapus hambatan dan mempermudah arus lalu lintas barang, jasa, kapital dan tenaga kerja. Pengurangan bahkan penghapusan tarif dan hambatan non tarif akan mempercepat terjadinya integrasi ekonomi regional seiring lancarnya lalu lintas barang, jasa, kapital dan tenaga kerja tersebut. Perdagangan bebas ataupun kerjasama regional diharapkan dapat menimbulkan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan. Tak dapat dipungkiri bahwa kerjasama perdagangan juga akan meningkatkan kompetisi antar anggota.

Namun apabila hal tersebut disikapi dengan bijak maka manfaat yang dapat dipetik antara lain adalah peningkatan spesialisasi dan peningkatan perdagangan itu sendiri. Dengan keunggulan komparatif dari masing-masing

---

<sup>16</sup> Roro Lonita Lorensa, "Skripsi berjudul Perubahan Strategi Perdagangan China Di Wilayah Asia Tenggara Dari Bilateralisme Ke Multilateralisme", 2011, Jakarta:Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

negara, setiap negara dapat berfokus pada produksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif sehingga akan terjadi realokasi faktor produksi. Pada akhirnya akan tercipta keseimbangan harga yang lebih murah dan output yang lebih banyak sehingga memberikan kesejahteraan lebih besar terhadap negara-negara yang terlibat.<sup>17</sup>

Teori yang dapat menjelaskan perdagangan internasional diantaranya H-O, *Standard trade model*, *economic of scale*, Free Trade Area (FTA) yang menimbulkan *trade creation dan trade diversion*.

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) mempunyai dua kondisi penting bagi dasar dari munculnya perdagangan internasional yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Analisis hipotesis H-O adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.

---

<sup>17</sup> Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19830/3/Chapter%20II.pdf> pada tanggal 26 Oktober 2011, pukul 7.22

<sup>18</sup> Tulus T.H. Tambunan, " Globalisasi dan Perdagangan Internasional", 2004, Bogor:Ghalia Indonesia, hal.66

- b. *Comparative Advantage* dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya.
- c. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya.
- d. Masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya.

Teori H-O mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas dikarenakan adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang memiliki (*endowment factors*) oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Selanjutnya negara-negara yang dimiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya.<sup>19</sup>

Menurut Paul Krugman,<sup>20</sup> perdagangan internasional dan geografi ekonomi dianggap sebagai sub-disiplin ilmu terpisah. Jika perdagangan internasional berbicara mengenai transaksi perdagangan antar negara, geografi ekonomi lebih berfokus pada arus migrasi individu atau perusahaan yang melampaui batas-batas geografi. Geografi ekonomi juga mencermati bagaimana

---

<sup>19</sup> Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19830/3/Chapter%20II.pdf> pada tanggal 26 Oktober 2011, pukul 7.22

<sup>20</sup> Paul, Krugman dan Maurice, Obstfeld. *International Economics: Politic and Theory*. (Pearson Addisin Wesley: Boston, 2009), hal 182



kota-kota mengorganisasi dirinya sendiri (ekonomi perkotaan). Perdagangan internasional berfokus pada dampak skala ekonomi terhadap sektor perdagangan dan lokasi bisnis. Konsep skala ekonomi diperoleh dari analisis yang berakhir pada kesimpulan bahwa makin banyak barang dan jasa diproduksi di satu pabrik yang sama, semakin rendah pula biaya produksi yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya *Economics of scale* bertolak belakang dengan teori H-O. Teori H-O mengasumsikan skala penambahan hasil yang konstan, sedangkan di dalam teori skala ekonomis, skala penambahan hasil tidak tetap, melainkan meningkat terus. Keadaan *economies of scale* adalah dimana semakin meluasnya pasar maka biaya rata-rata (*average cost*) yang ditanggung oleh produsen mengalami penurunan.<sup>21</sup> Biaya rata-rata dapat turun dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor *internal economies of scale* yang dimaksud adalah jika negara memproduksi barang begitu banyak. Faktor *eksternal economies of scale* terjadi jika pasar dan industri mengalami perluasan, maka biaya produksi dapat ditekan. Perluasan proses industri tidak hanya terjadi ke satu negara saja namun lingkungannya dapat ke lingkup regional bahkan internasional.

*Economies of Scale* (Skala Ekonomis) dalam ilmu mikro ekonomi, merujuk kepada keuntungan biaya yang berhubungan dengan ekspansi usaha. Adapun faktor yang menyebabkan rata-rata biaya produksi per unit saat ini turun saat jumlah output meningkat. *Economies of Scale* merupakan sebuah konsep yang merujuk pada pengurangan biaya per unit saat ukuran fasilitas dan tingkat penggunaan input lain meningkat. Sumber umumnya adalah pembelian,

---

<sup>21</sup> Tulus T.H. Tambunan, " Globalisasi dan Perdagangan Internasional", 2004, Bogor:Ghalia Indonesia, hal.66

manajemen, pemasaran, dan teknologi (mengambil keuntungan dari hasil skala dalam fungsi produksi). *Economies of Scale* merupakan sebuah konsep praktis yang penting untuk menjelaskan fenomena dunia nyata seperti pola-pola perdagangan internasional, jumlah perusahaan di pasar, dan bagaimana perusahaan bisa “terlalu besar untuk gagal”. Pemanfaatan skala ekonomi membantu menjelaskan mengapa perusahaan tumbuh besar di beberapa industri dan merupakan pembenaran untuk kebijakan perdagangan bebas, karena beberapa skala ekonomi mungkin memerlukan pasar yang lebih besar daripada yang mungkin dalam suatu negara tertentu.<sup>22</sup>

Dengan liberalisasi perdagangan baik yang bersifat internasional maupun regional, hambatan-hambatan perdagangan dapaturangi dan bahkan dihilangkan. Integrasi ekonomi regional adalah suatu proses dimana beberapa ekonomi dalam suatu wilayah bersepakat untuk menghapus hambatan dan mempermudah arus lalu lintas barang, jasa, kapital dan tenaga kerja. Pengurangan bahkan penghapusan tarif dan hambatan non tarif akan mempercepat terjadinya integrasi ekonomi regional seiring lancarnya lalu lintas barang, jasa, kapital dan tenaga kerja tersebut. Perdagangan bebas ataupun kerjasama regional diharapkan dapat menimbulkan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan. Tak dapat dipungkiri bahwa kerjasama perdagangan juga akan meningkatkan kompetisi antar anggota. Namun apabila hal tersebut disikapi dengan bijak maka manfaat yang dapat dipetik antara lain adalah peningkatan spesialisasi dan peningkatan perdagangan itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Kakali, Mukhopadhyay dan Paul J, Thomassin, “*Economic and Environmental Impact Of Free Trade In*” ,East and South East Asia (New York:Springer,2010),hlm 137

Dengan keunggulan komparatif dari masing-masing negara, setiap negara dapat berfokus pada produksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif sehingga akan terjadi realokasi faktor produksi. Pada akhirnya akan tercipta keseimbangan harga yang lebih murah dan output yang lebih banyak sehingga memberikan kesejahteraan lebih besar terhadap negara-negara yang terlibat. Banyak studi yang berkesimpulan bahwa perdagangan bebas berimplikasi positif bagi negara-negara yang terlibat. Disamping meningkatkan kesejahteraan, juga meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan efisiensi. Salah satu indikator untuk mengukur dampak kerjasama perdagangan internasional adalah dengan melihat terjadinya *trade diversion* dan *trade creation*. Dengan analisis *partial equilibrium*, *trade creation* adalah penggantian dimana produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional melalui pembentukan FTA dengan produk impor yang lebih murah dari anggota lain. Jika seluruh sumber daya digunakan secara *full employment* dan dengan melakukan spesialisasi berdasarkan *comparative advantage*, masing-masing negara akan memperoleh dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat karena memperoleh barang dengan harga yang relatif lebih murah. Efek positif dari *trade creation* ini bukan hanya berlaku untuk negara anggota, tetapi juga untuk negara lain yang bukan anggota karena adanya peningkatan spesialisasi produksi yang mendorong peningkatan impor dari negara lain. Adapun *trade diversion* terjadinya pengalihan perdagangan dari negara yang tidak ikut serta dalam perjanjian perdagangan tapi lebih efisien ke negara yang ikut serta dalam perjanjian walaupun kurang efisien. Manfaat perdagangan bebas atau kerjasama regional sangat ditentukan oleh salah

satu efek yang lebih dominan. Efek secara keseluruhan dapat bersifat positif, negatif ataupun netral, tergantung dari besarnya *magnitude* dari *trade creation* dan *trade diversion*. Perdagangan bebas akan sangat menguntungkan apabila dampaknya terhadap *trade creation* lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap *trade diversion*.<sup>23</sup>

Jika diibaratkan, bahwa negara adalah sebuah aktor yang sudah dilengkapi dengan seperangkat identitas dan kepentingan. Dalam kerjasamanya dengan Asia Tenggara, China kadang menyangkal bahwa dirinya berambisi untuk menyetarakan posisinya. Namun di suatu sisi, China merasa nyaman dengan Asia Tenggara karena antara keduanya memiliki historis yang begitu erat. Negara Asia Tenggara termasuk kawasan yang paling awal menerima China disaat China jatuh terpuruk pasca Tiananmen di tahun 1989. Hampir seluruh dunia mengisolasi China, dan negara awal yang mau menerima China kala itu adalah Asia Tenggara.

Dalam ACFTA, China merasa diuntungkan karena China memiliki skala usaha besar, sehingga biaya produksi menjadi semakin murah. China bermain pada *economies of scale*. Disamping itu, China memiliki kebijakan tidak mengapresiasi mata uang Yuan. Ketika China ketika tidak mengapresiasi mata uangnya, berarti mata uang tersebut cenderung terdepresiasi dari nilai sesungguhnya. Produk barang China menjadi lebih murah, sehingga mampu bersaing.<sup>24</sup> China lebih menekankan kerjasama multilateral yang pada awalnya

---

<sup>23</sup> Prabianto Mukti Wibowo, Any Ratnawati, Mangara Tambunan dan Erwidod, "Dampak Perdagangan bebas ASEAN-China Terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia, Khususnya Sektor Pertanian dan Kehutanan", 4 Desember 2008, Jakarta: JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 5 No., Hal. 265 – 293.

<sup>24</sup> Herry Prasetyo, "Guru Besar IPB: Soal ACFTA, Pemerintah Terlalu Berani Mati", Kontan Lifestyle tanggal 11 April 2011, diakses dari <http://lifestyle.kontan.co.id/v2/read/1302492187/64508/Guru-Besar-IPB-Soal-ACFTA-Pemerintah-terlalu-berani-mati> pada tanggal 06 Oktober 2011, pukul 22.45 wib

adalah kerjasama bilateral. China lebih menyukai karakter personal ASEAN yang mana ASEAN tidak terlalu *legally binding* seperti Eropa.

Transformasi ASEAN yang kian menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan strategis dan didukung oleh ASEAN kini yang telah memiliki payung hukum dan memungkinkan permasalahan diselesaikan di lingkup mereka saja. Dengan adanya kesamaan misi, maka terjalinlah kerjasama lebih dalam antara ASEAN dan China lewat kerangka kerjasama ACFTA yang lebih komprehensif. Dengan berlakunya ACFTA maka bermacam produk China, termasuk tekstil mulai tahun 2010 dipastikan membajiri di pasaran dalam negeri, dikarenakan bea masuknya nol persen.<sup>25</sup> Dengan perkembangan perdagangan barang antara ASEAN dan China dengan ini akan mendorong perdagangan antara ASEAN dan China menjadi *trade creation* atau *trade diversion*.

Tetapi banyak pihak yang menentang keberlangsungan ACFTA karena menganggap bahwa keberadaan ACFTA akan membuat industri mati dan tidak benar. Justru momen inilah saatnya industri-industri dapat bangkit dan bisa berimprovisasi serta berkembang menjadi industri besar. Dengan adanya persaingan justru membuat setiap perusahaan berusaha untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Inilah yang menjadi alasan pentingnya pelaksanaan perjanjian dengan China. Negara ASEAN harus mengatakan siap untuk menghadapi kondisi ini. Dengan adanya kerjasama ekonomi yang ruang lingkungannya regional akan terjadi spesialisasi produksi. Perdagangan bebas yang terjadi secara natural membuat negara berfokus pada wilayah produksi yang

---

<sup>25</sup> <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/30/indonesia-vs-china-studi-komparatif-bisnis-ekonomi-cafta/>, diakses tanggal 22/01/2010, pukul 08.10 WIB

paling unggul dari yang lain (*comparative advantage*). Akibatnya terjadi pengalihan produksi, dan peningkatan permintaan. Jika *comparative advantage* menyebutkan bahwa negara cenderung mengekspor barang-barang yang diunggulkan dalam faktor produksi, terutama tanah (*land*) dan tenaga kerja (*labour*). Sedangkan spesifik *trade model* menyebutkan bahwa yang termasuk faktor produksi tidak hanya tanah dan tenaga kerja saja, akan tetapi beragam. Pilihan negara untuk spesialisasi barang yang dimilikinya dipengaruhi oleh tingkat harga internasional.

#### **1.6.2. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Kepentingan nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Analisis sering memakai konsep “kepentingan nasional” sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.

Pendekatan Morgentau telah menjadi paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Bersama-sama dengan konsep power, kepentingan nasional merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pemikiran Morgentau didasarkan pada asumsi bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membuatnya bisa

mengendalikan satu atau beberapa negara lain yang bisa mengendalikan itu. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik pemaksaan maupun kerjasama.<sup>26</sup>

Secara umum, konsep kepentingan nasional diartikan sebagai kelangsungan hidup. Dalam pandangan Morgentau, kemampuan minimum negara-negara bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, ekonomi, keamanan dan kulturalnya dari gangguan negara lain. Biasanya kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Menurut Morgentau dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan khusus terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Misalnya perlombaan persenjataan, perimbangan kekuatan, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi, ataupun perang ekonomi.<sup>27</sup>

Dalam hal ini China mulai berubah kebijakannya untuk menuju kekuatan ekonomi dunia. China berusaha mencari ruang baru untuk memperluas pasar dan kemitraan baru untuk pengembangan, dengan tujuan untuk memastikan terus masuknya sumber daya dan modal, dan untuk melindungi kepentingan pasar dalam produksi ekspor. Tetapi China terus-menerus mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang, dan mengatakan bahwa sebagai proses dari transformasi, China akan mau menerima bantuan. Retorika ini berkorelasi langsung pada kepentingan strategis China terhadap negara-negara mitranya di

---

<sup>26</sup> Hans J. Morgenthau, "Politik antar bangsa", Yayasan Obor Indonesia.1990.

<sup>27</sup> Netty Rustiningsih, "Modul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional bagi mahasiswa Hubungan Internasional semester II FISIP UPN 'Veteran' Jakarta", hal.14

kawasan Asia dan Afrika. Pada saat ini China sedang bergerak menuju kerjasama multilateral, dengan harapan dapat memajukan tujuannya termasuk pembangunan ekonomi dan mempertahankan kelanjutan dari sistem politiknya. Secara umum strategi China yaitu menggunakan kebijakan yang lebih lunak (*soft power policy*) dengan tujuan memperingatkan dunia tentang konsekuensi dari masalah transnasional yang tidak menguntungkan yang timbul dari dalam sektor lingkungan, China menantang negara-negara mitra untuk ambil bagian dalam memecahkan masalah ini. Beberapa mendorong peningkatan kerja sama yang erat dengan China dengan tujuan untuk dapat menekan kekhawatiran atas ekspansi imperialis China di Asia Timur. Pemikiran lainnya menunjukkan bahwa pragmatisme tentang China secara negatif dapat mempengaruhi kepentingan negara-negara kecil di kawasan, seperti dalam kasus Myanmar. Tentu saja hal ini akan merusak atau melemahkan upaya ASEAN untuk menciptakan pondasi politik yang satu dengan misalnya mendukung kolaborasi bilateral. Ada beberapa faktor yang menyebabkan China membangun hubungan dengan ASEAN, khususnya dibidang ekonomi, yaitu:<sup>28</sup>

1. Kebijakan reformasi yang dijalankan oleh pemerintah China.
2. Kebijakan China dalam hal berhubungan dengan tetangga secara bersahabat.
3. Kedekatan geografis dan sejarah serta budaya dengan ASEAN.
4. Keterbatasan bahan mentah di China dan kepentingan nasional China yang ingin menggantikan posisi hegemoni dalam perekonomian dengan Jepang.

---

<sup>28</sup> Hans J. Giessmann, "ChIndia" and ASEAN: About National Interests, Regional Legitimacy, and Global Challenges, FES Berlin Briefing Paper 7, May 2007, hal, 3-4.



5. Orientasi kebijakan ekonomi ASEAN yang memang berkeinginan kuat untuk menjalin hubungan ekonomi dengan China.

Tetapi faktor yang paling penting adalah perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah pendorong bagi pembangunan ekonomi China-ASEAN. Oleh karena itu China dan ASEAN berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan luar negeri diantara mereka sejak memasuki tahun 1990-an. Pola perdagangan China-ASEAN memasuki dimensi baru dimana berkembangnya gejala interdependensi ekonomi membawa dampak pada meningkatnya hubungan ekonomi China-ASEAN. Sejak China resmi menjadi mitra dialog penuh ASEAN pada tahun 1996 dan keanggotaan China dalam ASEAN+3 sejak tahun 1997 semakin mempererat hubungan bilateral China-ASEAN yang secara otomatis semakin meningkatkan hubungan ekonomi khususnya perdagangan dan investasi antar kedua pihak.

### **1.6.3. Teori Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy*)**

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan "*action theory*", atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum politik luar negeri merupakan seperangkat tujuan yang dicari untuk memetakan bagaimana negara tersebut akan berinteraksi secara resmi dengan negara-negara lain atau aktor non negara di dunia. Politik luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.

Politik luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu:

1. *Foreign policy* sebagai sekumpulan orientasi. Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang diajarkan dari pengalaman sejarah, dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
2. *Foreign policy* sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkret yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi politik luar negeri. Pada fase ini rencana tindakan politik luar negeri ini akan memberikan pedoman bagi tindakan yang ditujukan pada situasi yang berlangsung lama, tindakan yang ditujukan pada negara-negara tertentu, dan tindakan yang ditujukan pada isu-isu khusus.
3. *Foreign policy* sebagai bentuk perilaku atau aksi.<sup>29</sup>

Sistem politik China mempercayakan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kepada berbagai struktur. Dalam hal ini kebijakan luar negeri China sangat dipengaruhi oleh banyak aktor diantaranya adalah lembaga, kementerian,

---

<sup>29</sup> Netty Rustiningsih, "Modul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional bagi mahasiswa Hubungan Internasional semester II FISIP UPN 'Veteran' Jakarta", hal.16

dan individu, masing-masing memainkan pengaruhnya agar dapat dijadikan sebuah kebijakan.<sup>30</sup>

Menurut Cristopher Hill, kebijakan luar negeri adalah suatu kumpulan dari hubungan eksternal resmi yang dilakukan oleh aktor independen yaitu negara dalam konteks hubungan internasional. Hubungan eksternal yang resmi memungkinkan masuknya semua kebijakan dari mekanisme pemerintahan sebagai input. Istilah “aktor independen” memungkinkan terjadinya pergeseran aktor. Padahal eksistensi dari hubungan eksternal resmi tersebut merupakan kebijakan. Karena jika tidak, hal ini akan dilihat sebagai kebijakan luar negeri yang terpisah. Perlu diketahui bahwa dunia dipisahkan oleh beragam komunitas yang berbeda, sehingga suatu kebijakan yang ada akan dinilai sebagai kebijakan luar negeri.<sup>31</sup>

Adapun tahap pembuatan kebijakan luar negeri adalah:

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Analisis lingkungan politik internasional dan domestik.
3. Menganalisis kapabilitas nasional yang dimiliki untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Memetakan berbagai opsi strategi dan perencanaan beserta kalkulasinya
5. Memilih opsi strategi dan perencanaan.
6. Mengembangkan strategi dan perencanaan untuk memakai kapabilitas nasional sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>30</sup> David Lampton, “*The Making of Chinese Foreign and Security Policy in the Era of Reform*”, (Stanford:Stanford University Press,2001), hlm.85

<sup>31</sup> Christoper Hill, “*The Changing Politics of Foreign Policy*”, (New York: Palgrave Macmillan,2003),hlm 3-5

7. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
8. Melakukan evaluasi.<sup>32</sup>

Menurut K.J. Holsti, kawasan dapat diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.<sup>33</sup> Secara rasional, setiap pemerintah akan mengidentifikasi tujuan mereka dan kemudian mengelola cara-caranya mencapainya melalui aksi politik atau kebijakan luar negerinya. Tujuan jangka panjang adalah untuk memenuhi paling tidak satu dari sejumlah nilai-nilai sosial, ekonomi, maupun simbolis serta sikap dan persepsi dalam negeri yang telah terbentuk oleh perkembangan sejarah, ideologi dan asumsi mengenai hidup yang ideal.<sup>34</sup>

Padahal apabila dijabarkan, substansi kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh :

- a. Faktor konteks eksternal yang meliputi: struktur sistem internasional, struktur ekonomi dunia, tujuan dan kebijakan negara lain, masalah global dan regional yang ditimbulkan oleh aktifitas pereorangan, serta hukum internasional dan pendapat dunia.
- b. Faktor politik domestik yang meliputi berbagai kebutuhan atau kepentingan sosioekonomi dan keamanan, karakter geografis, atribut nasional, struktur pemerintahan, opini publik, birokrasi, dan pertimbangan etis.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Op Cit* Netty Rustiningsih, hal 17.

<sup>33</sup> Craig A. Synder, "*Contemporary Security and Strategy*, (Palgrave:Macmillan,2008),hal.228

<sup>34</sup> *Ibid*,hlm 11

<sup>35</sup> *Ibid*,hal 271-274

- c. Pengaruh persepsi dan perilaku para aktor pembuat kebijakan meliputi citra, perilaku, nilai, doktrin, ideologi, analogi, dan bahkan kepribadian.

Adapun pilihan model-model perumusan kebijakan luar negeri diantaranya:

- a. Model Aktor Rasional

Asumsi dasar perspektif ini yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional. Fokus perhatian menekankan pada interaksi antar pihak-pihak yang terlibat daripada mengkaji suatu peristiwa hanya dari sudut pandang pihak yang memberikan tanggapan saja. Proses diarahkan pada pemilihan baik pemilihan tujuan-tujuan politik luar negeri, pemilihan alternatif-alternatif keputusan yang mungkin akan dijalankan dan pemilihan tindakan dari sekian banyak alternatif yang ada. Didalam perspektif strategi, pola umum dari kesinambungan dan perubahan politik luar negeri dijelaskan berdasarkan tujuan-tujuan strategis para pembuat keputusan.

John P. Lovel telah menyarankan adanya beberapa faktor utama yang memengaruhi proses perumusan strategi kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa, yaitu: struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Keempat faktor ini menentukan corak interaksi antar negara dalam perspektif strategi yang meliputi leadership strategy, confrontation strategy, accommodative strategy, dan concordance strategy. Istilah

leadership strategy menunjukkan adanya posisi pengawasan melalui cara persuasi dan tawar-menawar daripada melalui cara kekerasan (walaupun kadangkala cara kekerasan mungkin saja dapat dikombinasikan dengan cara persuasi). Pada tipe strategi ini suatu negara menganggap kapabilitasnya superior dan strategi negarabangsa lain mendukung. Concordance strategy mengacu pada adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Namun, menyadari bahwa kapabilitasnya relatif lebih rendah daripada negara A, maka para pembuat keputusan negara B akan berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan negara A dengan cara menghindari pembuatan kebijakan luar negeri yang dapat menimbulkan konflik dengan negara A, dan negara B akan bertingkah laku selaras dengan inisiatif-inisiatif negara A.<sup>36</sup>

Sementara itu, menurut *confrontation strategy*, negara-bangsa A akan mencoba untuk mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan dengan negara B, dan memaksa negara B untuk memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas kapabilitas negara A. Di lain pihak, dengan adanya pengakuan negara B terhadap superioritas kapabilitas negara A, maka diharapkan negara B akan mencoba untuk membuat strategi penyesuaian-penyesuaian (*accommodation strategy*) untuk menghindari konflik, meskipun ada kemungkinan di waktu depan negara B akan menerapkan strategi konfrontasi (*confrontation strategy*)

---

<sup>36</sup> John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970, especially chapter 3.

ketika kapabilitas negara B meningkat.<sup>37</sup> Keempat varian strategi di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1 : Policy makers' estimates of the strategy of another nation-state and estimates of their own relative capabilities as determinants of the style of interaction**



Sumber: John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970, especially chapter 3. Dalam Artikel Yanyan Mochamad Yani, yang berjudul "Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis"

Kelemahan yang melekat pada model ini adalah asumsi mengenai perhitungan rasional dari para pembuat keputusan. Sering terjadi suatu keputusan yang rasional bagi seseorang belum tentu rasional pula bagi orang lain. Dalam banyak literatur mengenai studi politik luar negeri dijelaskan bahwa para pengambil keputusan akan bertindak rasional. Kesulitan muncul ketika kita mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 98-101

dengan keputusan atau tindakan rasional, dipandang rasional oleh siapa atau rasional untuk siapa.

#### b. Model Pembuatan Keputusan

Dalam model ini, motivasi dari pembuat keputusan (nilai dan norma yang dianut) memegang peranan penting. Selain itu yang menjadi fokus adalah arus informasi diantara mereka serta pertimbangan pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka dan keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (situasional).

Model ini menyatakan bahwa faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (decision-makers). Kelebihan model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari proses politik luar negeri itu sendiri.<sup>38</sup> Maka itu faktor-faktor paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah:

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut).
2. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi).
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri.

---

<sup>38</sup> James A. Robinson dan Richard C. Snyder, "Decision-Making in International Politics", in Herbert C. Kelman, ed., *International Behaviour: A Social-Psychological Analysis*. New York, Holt, Rinehart and Winston, 1965, pp.433-463; G.M., Herek, Irving L. Janis, and P. Huth, "Decision-Making During International Crises: Is Quality of Process Related to Outcome?", *Journal of Conflict Resolution* 31 (2), 1987, pp.203-226; Jack Levy, "Prospect Theory and International Relations: Theoretical Applications and Analytical Problems", *Political Psychology* 13 (2), 1992, pp.171-186.



4. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

c. Model Politik Birokratik

Dalam model ini ditekankan pada peran yang dimainkan birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri. Pada model ini pemerintah dianggap terdiri dari sekian banyak individu dan organisasi. Konsekwensi yang muncul adalah keputusan tidaklah dipandang sebagai produk rasionalitas melainkan produk dari proses interaksi dan penyesuaian dari berbagai individu dan organisasi. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan proses politik yang meliputi rundingan-rundingan (*bargaining*), kompromi (*compromise*), dan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*).<sup>39</sup>

d. Model Adaptif

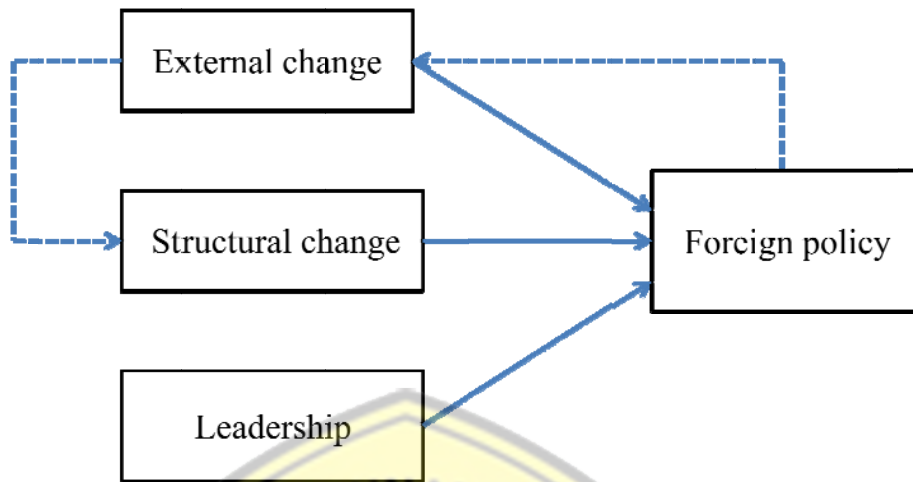
Dalam model ini merupakan respon negara terhadap hambatan dan peluang yang tersedia dalam lingkungan nasional. Model ini berupaya untuk memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri berdasarkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki suatu negara dan posisi geopolitiknya. Secara umum, politik luar negeri yang dipandang sebagai model adaptif dapat dilihat pada gambar di bawah ini.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Peter A. Toma dan Robert F. Gorman. 1991. *International Relations : Understanding Global Issues*. Pacific Grove, California : Brooks Cole Publishing Company, hal. 135-136.

<sup>40</sup> John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc., hal. 133-156.

**Gambar 2. Model Adaptif Politik Luar Negeri**



Sumber: James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications, 1974, hal. 47

Menurut model ini politik luar negeri merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Dengan kata lain, tindakan politik luar negeri suatu negara pada suatu waktu tertentu merupakan penjumlahan dua variabel independen, yaitu perubahan eksternal dan perubahan struktural (internal).

James N. Rosenau mengemukakan bahwa situasi dan kondisi internal dan eksternal saling berinteraksi proses pembentukan kebijakan luar negeri sebuah negara. Keterkaitan antara aspek nasional internasional digunakan sebagai

variabel yang terikat. Keterkaitan aspek internal dan eksternal memberikan input dalam kebijakan suatu negara.<sup>41</sup>

Menurut Samuel S.Kim mengemukakan ada 3 (tiga) pendekatan utama yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China. Pertama, pendekatan internal. Kedua, pendekatan eksternal. Ketiga, keterkaitan antara faktor internal dan eksternal.<sup>42</sup>

Dalam Kebijakan ekonomi China di Asia Tenggara diawali sejak krisis finansial yang menimpa kawasan Asia Tenggara dan juga adanya tekanan akibat pertumbuhan ekonomi China yang terus-menerus meningkat, dimana telah mendorong ASEAN untuk lebih mengutamakan stabilitas ekonomi domestik dan pertumbuhan ekonomi daripada ancaman keamanan eksternal. Sejak akhir 1990an kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara pada umumnya berkaitan dengan tampak pertumbuhan ekonomi China yang mengancam negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk mengurangi kekhawatiran ASEAN, China mulai secara aktif mengajukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan negara-negara ASEAN akan stabilitas finansial, perdagangan dan investasi dengan dalih merupakan kebutuhan nasional China pula untuk mempererat hubungan ekonomi China dan ASEAN serta untuk memperkuat perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Dengan menekankan hasil yang saling menguntungkan, China menerapkan kebijakan untuk mengurangi kekhawatiran regional dengan meyakinkan dan membangkitkan optimisme dikalangan pemimpin ASEAN bahwa China yang

---

<sup>41</sup> James N.Rosenau, "Introduction: New Directions and Recurrent Question in the Comparative Study Foreign Policy", *New Direction in the Study of Foreign Policy*, eds Charles F.Hermann, Charles W.Kegley, Jr., James N.Rosenau, Boston: Allen & Unwin, 1987, hlm.1

<sup>42</sup> Samuel S.Kim, "China and the World in Theory and Practice, China and the World Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era", eds Samuel S.Kim Boudler: Westview Press, Inc, 1994, hlm21

semakin kuat terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesehjahteraan di kawasan Asia Tenggara, sekaligus mengurangi rasa ketidakpercayaan.<sup>43</sup>

Tetapi, tidak menghalangi China melancarkan manuver kebijakan, yang tidak dipunyai oleh negara-negara Asia lain dalam menghadapi krisis. Padahal kebebasan melancarkan manuver tersebut yang sangat dibutuhkan untuk dapat membangun kembali perekonomian Asia. Sampai saat ini *sustainability* dari proses reformasi ekonomi China tampak berjalan lancar dan cukup berhasil. Yang menarik adalah bahwa proses reformasi ekonomi China dapat dilaksanakan tanpa mengubah sistem politiknya. Dalam mewujudkan tekadnya untuk memperkuat perekonomiannya, China lebih berkepentingan menjalin hubungan yang lebih erat dengan ASEAN. Untuk itu berbagai kebijakan dan cara ditempuh China di dalam menganstisipasi berbagai faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal, China menjalin hubungan bersahabat dengan negara-negara lain.<sup>44</sup> Dengan ASEAN, China bersikap lunak dan bersahabat. Faktor internal, para pemimpin China mentransformasikan modal, kesempatan untuk mendorong elite dan masyarakatnya bersikap produktif dan mengerjakan berbagai hal dalam standar internasional. Sekarang China telah menjadi negara yang paling produktif diseluruh dunia, dan hasilnya dapat dilihat di pasaran dunia.

Lalu dalam kebijakan perdagangan China di Asia Tenggara, China mencoba untuk menguasai peluang pasar di Asia Tenggara, dengan hasil produksi

---

<sup>43</sup> Rahadian T. Akbar, "Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerja Sama", 2011, Jakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

<sup>44</sup> David Shambaugh, "Power Shift: The Rise of China and Asia's New Dynamics", University of California Press, 2005, 1-3

bukan lagi “*Made in Asia*” , tetapi menjadi “*Made in China*”. Dimana China melihat masyarakat ASEAN mempunyai sifat komsumsimers. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pendekatan tersebut, penulis akan menggunakan model sistem kebijakan luar negeri China menurut Samuel S.Kim sebagai berikut:

### **Gambar 3. Model Sistem Kebijakan Luar Negeri China**



Sumber: Bagian diatas merupakan penyerdahanaan dari bagan yang dibuat oleh Samuel S.Kim. Lihat dalam, Samuel S.Kim, “*Chinese Foreign Policy Behaviour*”, “*China and the World: Chinese Foreign Policy in the post-Mao Era*, Samuel S.Kim (Boulder:Westview Press,Inc,1984),hlm.6

China memiliki prinsip-prinsip sebagai pegangan bagi kebijakan luar negerinya secara umum. Tetapi, prinsip tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan China, sehingga China cenderung bersifat pragmatis. Lima prinsip yang dianut China<sup>45</sup> tersebut antara lain:

1. Lima prinsip hidup berdampingan.
2. Membangun tatangan ekonomi dan politik dunia yang layak dan adil.
3. Tidak menggunakan kekuatan atau ancaman yang menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional.
4. Semua bangsa, besar atau kecil, kuat atau lemah, kaya atau miskin, adalah setara dalam masalah-masalah internasional
5. China harus selalu berpihak pada negara-negara berkembang, China seharusnya tidak berupaya menjadi hegemon atau status adidaya.

Sedangkan *Five Principles of Peaceful Coexistence*<sup>46</sup> diantaranya:

1. Saling menghormati kesatuan wilayah masing-masing.
2. Tidak melakukan agresi.
3. Tidak melakukan intervensi dalam masalah dalam negeri masing-masing negara
4. Kesamaan dan saling menguntungkan
5. Hidup damai berdampingan

---

<sup>45</sup> *Op Cit*, hlm.30-31

<sup>46</sup> Flemming Christiansen and Shirin M. Rai, *Chinese Politic and Society: An Introduction*, (London: Prentice Hall, 1999), hlm. 169

## 1.7. Model Analisis



## 1.8. Asumsi

Dalam penelitian mengenai China menggunakan strategi perdagangan sebagai instrumen untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara, penulis berasumsi:

- a. Strategi perdagangan merupakan instrumen kebijakan luar negeri China untuk mencapai kepentingan nasionalnya di wilayah Asia Tenggara.
- b. China merupakan aktor rasional yang pilihan strateginya untuk mencapai kepentingan nasional didasarkan perhitungan *cost and benefit*.

- c. Asia Tenggara merupakan wilayah strategis tempat dimana China memaksimalkan kepentingan nasional dan memiliki peluang pangsa pasar yang luas bagi China.

### **1.9. Hipotesis**

China mempunyai kepentingan di Asia Tenggara yaitu untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara. Untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara, China menggunakan strategi perdagangan. Adapun strategi perdagangan yang digunakan yaitu dengan hubungan kerjasama baik bilateral dan multilateral dan usaha China untuk penerapan uang bersama yaitu mata uang Yuan untuk transaksi dalam kegiatan perdagangan. Strategi perdagangan ini akan menimbulkan trade creation, trade diversion, dan adanya ketergantungan ASEAN terhadap China. Sehingga China dapat membendung pengaruh Amerika Serikat, dimana China akan dapat menguasai ekonomi di Asia Tenggara dan pertumbuhan ekonomi China akan meningkat.

### **1.10. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif explanatif, dimana penulis berupaya menjelaskan mengenai Cina yang menggunakan pendekatan perdagangan untuk mencapai kepentingan di wilayah Asia Tenggara.



Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan satu jenis data yakni data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet. Untuk data-data sekunder ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *internet research* dan *documentary research*.

Dalam menganalisis data, penulis akan melakukan serangkaian prosedur yang meliputi pemurnian data, kategorisasi data (coding) dan interpretasi serta induksi data menjadi sebuah generalisasi. Dalam aktivitas pemurnian data, penulis memilih data-data yang benar-benar diperlukan berdasarkan *insight* teori yang dipakai. Kemudian setelah itu, penulis mengelompokkan data-data kedalam kategori-kategori tertentu yang penulis buat berdasarkan indikator-indikator yang penulis turunkan dari teori yang dipakai. Penulis kemudian membuat interpretasi dan generalisasi mengenai logika kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar data-data tersebut berdasarkan logika explanatoris teori. Selanjutnya data-data tersebut diintegrasikan dan digeneralisasikan untuk memperoleh penjelasan umum (*inference*) terhadap fenomena yang diteliti dan juga berdasarkan sistematika penulisan.

### **1.11. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

#### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan penjabaran dari pendahuluan yang meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, model analisis, asumsi, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II. Strategi Perdagangan China Untuk Membendung Pengaruh Amerika Serikat Di Wilayah Asia Tenggara**

Bab ini merupakan penjelasan tentang kepentingan ekonomi China di wilayah Asia Tenggara, pengaruh Amerika di Asia Tenggara yang merupakan ancaman bagi China, pilihan-pilihan strategi China untuk membendung pengaruh AS di wilayah Asia Tenggara .

#### **BAB III. Penyebab Perubahan Strategi Perdagangan China**

Bab ini merupakan penjabaran yang meliputi penjelasan tentang faktor-faktor perubahan strategi perdagangan China yang terdiri dari faktor eksternal dan internal, analisis tentang cost dan benefit pilihan strategi perdagangan yang digunakan China, implikasi strategi perdagangan China bagi kepentingan China: apakah kepentingan nasionalnya tercapai dengan strategi perdagangan yang diambil.

## **BAB IV. Penutup**

Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini peneliti mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

